
PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SEDATIGEDE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Rizky A. Prasojo
Luluk Fauziah

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
email: rizkyakbarp@gmail.com, lulukfauz@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini mulai Kepala Desa (sebagai *key informan*), Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, Karang Taruna, hingga masyarakat umum. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

Kata Kunci: peran, kemitraan, pembangunan

THE ROLE OF GOVERNMENT AND COMMUNITY ON THE DEVELOPMENT IN SEDATIGEDE VILLAGE, SIDOARJO REGENCY

ABSTRACT

This study aimed to describe the role of government-community on the development in the Sedati Gede Village, Sidoarjo Regency and its supporting and inhibiting factors. This research used qualitative descriptive method. The informants in this research are Head Village (as key informan), village government, Karang Taruna and citizen. Technique data is collected by triangulation (combined), data analysis is inductive, and qualitative research results further emphasize the significance rather than generalization. The results showed that the government's role in the development of Sedatigede village was quite good and balanced. Their cooperation was mutualistic which the parties involved in understanding the position and role in rural development. The village government got the role in facilitating community and provides good guidance to the public about the purpose of the development to be carried out. Society plays a role in contributing ideas, power, and material in succession of development. Meanwhile, the supporting factors in this cooperation used human society approach and they had a good understanding of the position and its role in development. In addition, the inhibiting factor is the lack of public awareness on environmental hygiene as well as the persistence of the notion that the government was subordinate to the people and objects in development supervision.

Keyword: role, partnership, development

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari penurunan angka kemiskinan, Kabupaten Sidoarjo dapat dibilang telah mampu (setidaknya telah berupaya) mewujudkan tujuan utama pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2008 sebanyak 193.394 orang (9,44%) dari 1,6 juta penduduk, menjadi 136.300 orang (6,97%) pada tahun 2011.

Penurunan angka kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat

kesejahteraan masyarakat. Goulet dalam Theresia, dkk (2014: 2) mengungkapkan bahwa yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman. Namun lebih dari itu, kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari indikator seperti berikut: a) tercapainya *swasembada* (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya; b) peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain); c) diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Artinya penurunan angka kemiskinan hanya berarti tercapainya satu poin indikator kesejahteraan, yakni tercapainya *swasembada*, dan itu pun belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang utuh, maka dibutuhkan berbagai upaya serius salah satunya dengan menemukan formula paradigma pembangunan yang tepat. Berbagai perubahan paradigma pembangunan pun terjadi. Dari paradigma *production centered development* yang lebih menekankan adanya perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa mempedulikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak, hingga paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat (*people oriented development*) yang menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Keseimbangan peran dan posisi sangat menentukan ketercapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sebagaimana pandangan Tjokroamidjojo (1982: 19) yang menganggap bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai jika melibatkan seluruh masyarakat dalam suatu negara. Masyarakat harus mempunyai porsi peran dan posisi yang seimbang dengan pemerintah. Masyarakat bukan hanya dijadikan objek pembangunan, melainkan juga pelaku pembangunan. Sebagai contoh, masyarakat bisa saja mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan hingga pemukiman dengan adanya program pembangunan. Namun, dengan kemampuan tersebut apakah masyarakat mampu untuk hidup lebih berkembang atau justru tergantung pada program pembangunan? Maka, masyarakat harus didorong untuk menjadi pelaku utama dalam pembangunan, sekaligus penikmat hasil pembangunan. Harus ada pembagian peran yang seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Jika hanya dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, Kemampuan masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan dasar relatif baik. Data penurunan angka kemiskinan di awal tadi lebih dari cukup untuk menjelaskan premis tersebut. Pembangunan fisik Kabupaten Sidoarjo cukup berkembang. Demikian pula pembangunan di Desa Sedatigede. Sarana prasarana

Desa cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas umum mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Di Desa Sedatigede terdapat 1 unit Puskesmas, Polindes, Praktek Bidan, serta Posyandu (sebanyak 8 unit), 3 unit sekolah tingkat menengah pertama dan atas, 12 unit sekolah tingkat dasar, hingga 1 unit pasar desa (Monografi Desa Sedatigede: 2014).

Namun, sebagaimana penjelasan di awal, berbagai kelengkapan fasilitas dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, belum cukup untuk menilai bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Sedatigede telah tercapai. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? serta bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.

LANDASAN TEORETIS

Kemitraan Pemerintah Masyarakat

Kemitraan merupakan suatu hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Ibrahim 2006:26). Sedangkan menurut Hafsah (2000: 43) kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Sumarto (2009: 116) kemitraan merupakan hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian. Sedangkan Sulistiyani (2004:130-131) mengklasifikasikan pola kemitraan yang dapat terjadi antara pihak yang bermitra antara lain:

- a) Kemitraan Semu (*Pseudo Partnership*): Kemitraan semu adalah kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun pihak yang bermitra sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang. Bahkan di satu pihak belum tentu memahami dengan benar akan makna dan tujuan sebuah kerjasama yang dilakukan serta disepakati tersebut.
 - b) Kemitraan Mutualistik: Kemitraan mutualistik merupakan kemitraan antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan
-

mendapatkan manfaat lebih. Sehingga pihak yang terlibat dalam kemitraan ini saling menunjang untuk mewujudkan visi dan misi satu sama lain.

- c) Kemitraan Konjugasi: Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Pemerintah

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah ke dalam tiga kelompok, yakni:

- a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan, serta pengawasan.
- b. Pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
- c. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

Masyarakat

Menurut Arnstein (1969) peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam peraturan perundangan (Hardjosoemantri, 1986: 27). Peran serta masyarakat ini

merupakan kemitraan diantara para *stakeholder* khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “*Public Private Partnership*”. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan kekuatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Pembangunan

Pembangunan sejatinya bukanlah fenomena materi (fisik) semata, pembangunan harus melampaui sisi materi dari kehidupan manusia. Todaro (2000: 20) mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Senada dengan Todaro, Effendi (2002: 9) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah. Siagian (2012: 57-127) dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembangunan bukan hanya fisik saja, namun mencakup hampir semua bidang diantaranya: politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Dengan memilih lokasi penelitian di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, fokus penelitian ini adalah peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Sedatigede menunjukkan bahwa pembangunan di desa tersebut cukup baik. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Hadari, 2007: 157).

Dari teknik tersebut, didapat beberapa informan mulai Kepala Desa (sebagai *key informan*), Perangkat Desa, Kepala Dusun, BPD, Karang Taruna, hingga masyarakat umum. Untuk mendapat data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara informan, hingga dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis

menggunakan teknik reduksi data (pemilihan dan pengelompokan data), penyajian data (membandingkan data di lapangan dengan teori), dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa pembangunan Desa Sedatigede cukup baik. Dari pembangunan fisik hingga non-fisik hampir semua terlaksana. Pembangunan fisik Desa Sedatigede lebih ditekankan pada program penanggulangan banjir dan penataan lingkungan seperti normalisasi sungai, pembuatan drainase, pengelolaan sampah, hingga pavingisasi. Sedangkan pembangunan non-fisik lebih ditekankan pada pelestarian kebudayaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan pembangunan Desa Sedatigede dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini:

Tabel 1.
Pembangunan di Desa Sedatigede

No.	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Keterangan
A. Pembangunan Fisik			
1.	Pavingisasi dan Penerangan jalan	PNPM, APBD Provinsi, Block Grand, DAD, APBDes.	Proses Pelaksanaan
2.	Penanggulangan banjir: -Pelengsengan sungai -Normalisasi kali <i>Affoor</i> -Pembangunan saluran air	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Block Grand, DAD, PNPM.	Proses Pelaksanaan
3.	Penataan lingkungan: -Pembuatan pot bunga -Pengadaan bak Sampah -Pembangunan Pos Keamanan lingkungan	PNPM, DAD	Proses Pelaksanaan
B. Pembangunan Non Fisik			
1.	Posyandu	DAD	Terlaksana
2.	Penyuntunan fakir Miskin dan yatim Piatu	DAD, Swadaya masyarakat, LSM	Terlaksana
No.	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Keterangan
3.	Pengobatan gratis	DAD	Terlaksana
4.	Penyemprotan demam berdarah	DAD	Terlaksana
5.	Kegiatan senam	DAD	Terlaksana
6.	Jamkesmas	DAD	Terlaksana
7.	Sedekah bumi/ ruwah dusun	Swadaya masyarakat	Terlaksana

(Sumber: Data yang diolah, 2015)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sumber dana pembangunan desa tidak hanya berasal dari pemerintah, namun juga dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Sedatigede dalam wawancara pada tanggal 7 Mei 2015, bahwa masyarakat Desa Sedatigede telah cukup mempunyai inisiatif untuk merancang, melaksanakan, hingga mengawasi sendiri proses pembangunan yang hasilnya nanti untuk dinikmati bersama.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Salah satunya dengan mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam perspektif ini, desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil desa yakni masyarakat hingga elemen struktural yakni pemerintah desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun desa sebagai organisasi. Seperti halnya tahapan yang ada dalam kebijakan publik, dalam pembangunan sendiri juga terdapat 3 (tiga) tahapan utama yakni perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Maka dalam penganalisisan data ini, peran pemerintah-masyarakat akan dijelaskan ke dalam tiga bagian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Peran Pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari perspektif Arifin (2012: 104-118) tentang beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yakni sebagai penentu arah, wakil dan juru bicara organisasi, komunikator yang efektif, mediator, hingga integrator. Dalam pembangunan Desa Sedatigede, peran Pemerintah dapat terlihat mulai dari tahap perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa memfasilitasi warga untuk melakukan berbagai pertemuan dari tingkat RT hingga tingkat Desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Dari berbagai permasalahan masyarakat yang terkumpul, pemerintah melakukan pengkajian sehingga didapat peta permasalahan. Disini peran pemerintah sebagai penentu arah mulai terlihat jelas. Dari peta permasalahan tersebut Pemerintah Desa Sedatigede memberikan poin-poin masalah yang sebaiknya diprioritaskan. Poin tersebut nantinya dijadikan untuk pedoman arah pembangunan.

Pada tahap selanjutnya, pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan melalui pertemuan tingkat desa, yakni Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dalam proses koordinasi tersebut, pemerintah berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, dalam hal ini Desa Sedatigede. Sebagai wakil dan juru bicara desa, pemerintah dituntut untuk menyampaikan pesan pembangunan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, pemerintah desa juga harus berperan sebagai komunikator yang efektif.

Dalam musyawarah tersebut, masyarakat mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan pendapat. Seperti halnya yang dikatakan Huraerah (dalam Laksana, 2013: 61), bahwa dalam pembangunan masyarakat bisa berperan untuk menyumbangkan pemikiran. Kenyataan yang terjadi di Desa Sedatigede, permasalahan seringkali muncul dalam tahap penentuan skala prioritas ini. Salah satunya adalah ketidaksamaan pandangan tentang pesan pembangunan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Contohnya, di satu pihak memandang bahwa pavingisasi lebih mendesak untuk dilaksanakan, sementara di pihak lain menganggap normalisasi sungai-lah yang lebih penting. Akibatnya perdebatan terjadi, semua pihak merasa mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat.

Agar permasalahan tidak meluas, maka pemerintah sangat dibutuhkan perannya untuk menengahi konflik (mediator). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, didapatkan inti bahwa Pemerintah Desa Sedatigede beranggapan sebagaimana Nugroho (2011: 505) dalam bukunya *Public Policy* yang menyatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Atau, dalam bahasa pembangunan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari pembangunan itu sendiri. Jadi, setiap permasalahan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Sedatigede berusaha untuk menyelesaikan sebaik mungkin agar konflik tidak meluas ke tahap selanjutnya dan proses pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.

Dalam menengahi konflik, tentu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Pemerintah Desa Sedatigede melakukan pendekatan manusiawi pada pihak-pihak yang berkonflik salah satunya dengan mengunjungi rumahnya. Dengan begitu, masyarakat (pihak yang berkonflik) merasa diperhatikan dengan baik sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan kembali pihak yang berkonflik tersebut.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah semua permasalahan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan dapat diatasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Masyarakat membuat proposal pengajuan dana sesuai skala prioritas dan perencanaan yang telah ditentukan bersama. Pemerintah disini berperan sebagai regulator yang menyetujui proposal pengajuan dana dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai *suplaier* yang memberikan dana pembangunan agar dapat dikelola masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat terlihat lebih jelas. Masyarakat berperan mulai dari memberikan tenaga hingga harta benda. Inisiatif masyarakat diantaranya adalah ikut serta membuat pondasi jalan, memberikan makanan dan minuman untuk tukang, hingga menyisihkan sebagian uang untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Kekurangan dana terjadi karena berbagai sebab, terutama oleh pembengkakan anggaran akibat salah memperhitungkan estimasi belanja. Disini pemerintah berperan untuk memberikan masukan-masukan dan arahan bagaimana cara menutupi kekurangan dana. Dalam perspektif Arifin peran ini termasuk peran pemerintah sebagai penentu arah. Selain itu, pemerintah juga berperan untuk melakukan pendekatan pada para pengusaha agar mau menutupi kekurangan dana. Peran ini termasuk peran pemerintah sebagai juru bicara organisasi.

Dilihat dari kategorisasi pola kemitraan Sulistiyani (2004:130-131), peran pemerintah-masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa Sedatigede cukup seimbang. Kerjasama yang terjadi lebih bersifat mutualistik. Pemerintah menyadari bahwa setiap proses pembangunan akan selalu membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan. Sedangkan masyarakat memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Masyarakat telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses pembangunan. Artinya, kedua belah pihak mempunyai kesamaan visi sehingga saling mendukung satu sama lain dan saling mendapatkan manfaat yang seimbang.

Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi pembangunan. Agak sedikit berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam tahap ini pemerintah lebih mendominasi. Dominasi ini terutama dapat dilihat dalam pengawasan pembangunan fisik. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Sedatigede menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Desa Sedatigede membentuk tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat untuk melaporkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. Peran masyarakat memang masih terlihat yakni sebagai pengawas langsung. Namun dalam menentukan evaluasi, pemerintah lebih dominan. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah membentuk tim audit internal jika terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Dari temuan di lapangan, ada semacam garis komando dari atasan (pemerintah) kepada bawahan (masyarakat). Adanya instruksi untuk membentuk tim pengawas adalah salah satu fakta bahwa dalam pengawasan pembangunan, pemerintah Desa Sedatigede lebih mendominasi. Dalam perspektif sulistiyani (2004:130-131), pola kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pengawasan pembangunan ini lebih bersifat semu (*psuedo pertnership*). Dalam kerjasama ini, pihak-pihak yang bekerjasama sebenarnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan salah satu pihak belum memahami makna dan tujuan kerjasama yang dilakukan. Dalam temuan di lapangan, masyarakat Desa Sedatigede belum sepenuhnya memahami arti penting pengawasan pembangunan. Meskipun begitu, dalam pengawasan pembangunan fisik, masyarakat Desa Sedatigede lebih berperan aktif. Peran ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan sosial terhadap kenakalan remaja, pendatang baru, hingga keamanan lingkungan.

Sedangkan pengawasan pembangunan nonfisik khususnya pembangunan mental, Pemerintah Desa lebih berperan sebagai koordinator saja. Peran pengawasan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Dan penanggungjawab langsung dalam pengawasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT. Pengawasan yang dilakukan Ketua RT dapat dilihat ketika ada pendatang baru. Semua pendatang baru harus melapor pada Ketua RT. Apabila ada pendatang baru yang tidak melaporkan diri maka yang paling dianggap bertanggungjawab adalah Ketua RT. Tidak hanya sampai disitu, tanggung jawab pembinaan terhadap para pemuda juga sedikit banyak diberikan oleh Ketua RT. Meskipun hal demikian seharusnya merupakan tanggung jawab bersama, namun Ketua RT adalah penanggungjawab utama atas kerukunan, keamanan, hingga kebersihan lingkungannya. Hal ini mengingat Ketua RT merupakan ujung tombak kepemimpinan yang ada di masyarakat luas. Sebagaimana pendapat Hari T. W (2013) dalam bulletin bulanan Maiyah Jawa Timur yang menyebut bahwa Ketua RT sangat berperan dalam membantu tugas pemerintah secara langsung dalam masyarakat. Ketua RT berperan menjaga keamanan hingga mendengar aspirasi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum kerjasama yang dibangun antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa

Sedatigede cukup baik dan bersifat mutualistik. Keadaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bersifat manusiawi. Selain itu, komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Sedatigede cukup baik dan efektif terutama dalam memediasi konflik. Adanya *reward and punishment* juga menjadi faktor dalam mewujudkan kerjasama yang baik tersebut. Peran masyarakat yang mendukung proses kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedati diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan, masyarakat memberikan partisipasinya berupa kehadiran dalam pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT hingga Musrenbang. hal ini memudahkan Pemerintah Desa untuk melakukan koordinasi maupun memberikan sosialisasi pembangunan.
2. Peran masyarakat yang secara aktif memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Desa yang oleh Huraerah (dalam Laksana: 2013: 61) disebut sebagai partisipasi buah pikiran. Peran ini memudahkan Pemerintah Desa untuk mengambil keputusan karena Pemerintah Desa menjadi lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat mempunyai berbagai inisiatif untuk memperlancar proses pembangunan. Inisiatif tersebut berupa pemberian makanan, membantu para tukang, hingga menyisihkan hartanya untuk menutupi kekurangan dana yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat melalui tim pelaksana pembangunan juga memahami bagaimana mengelola dana yang baik dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini memudahkan Pemerintah Desadalam memberikan arahan dan pembinaan.
4. Dalam pengawasan pembangunan, khususnya pembangunan nonfisik, masyarakat secara aktif melibatkan diri. Sedangkan dalam pembangunan fisik, meski masih bersifat *subordinate union of partnership*, masyarakat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui tim pengawas terhadap jalannya pembangunan.

Selain masyarakat yang secara umum memahami posisi dan perannya, peran Pemerintah Desa dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik. Kasmiah (2014) dalam penelitiannya berjudul “Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)” menemukan bahwa Pemerintah Desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan dengan sendirinya akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di Desa Sedatigede Faktor pendukung dari pihak Pemerintah Desa dalam kerjasama tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Pemerintah sebagai fasilitator dan koordinator melakukan pendekatan pada masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar warga. Pemerintah Desa menghadiri langsung pertemuan-pertemuan dari level RT tersebut sehingga masyarakat merasa bahwa pertemuan tersebut memang sangat penting.
2. Pemerintah Desa melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bertentangan dengan mengunjungi rumahnya. Pendekatan seperti ini membuat masyarakat lebih mudah menyadari arti penting kesamaan visi-misi demi kebaikan bersama.
3. Dalam membuat peraturan, Pemerintah Desa memberikan fasilitas untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini membuat masyarakat lebih mudah untuk mentaati aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
4. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa memberikan porsi lebih banyak kepada masyarakat untuk berperan. Hal ini membuat masyarakat merasa diperhatikan dan dilibatkan secara penuh. Dalam temuan disebutkan, dengan memberikan porsi yang lebih besar tersebut, masyarakat terdorong untuk melakukan pembangunan dengan sebaik-baiknya karena merasa dimanusiakan. Dorongan seperti ini dalam teori organisasi disebut pemberian *reward and punishment* untuk memotivasi anggota organisasi. Motivasi berupa penghargaan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian wewenang tersebut membuat masyarakat merasa dihargai oleh Pemerintah Desa.
5. Pendekatan dalam pembangunan nonfisik yang dilakukan Pemerintah desa Sedatigede sangat baik salah satunya dengan mengadakan berbagai acara kebudayaan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan baik karena kekompakan tersebut.

Sedangkan faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa adalah adanya pihak-pihak dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, dalam hal kebersihan lingkungan dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah banyak disediakan namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. Selain itu, inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah masih sangat kurang. Masyarakat lebih memilih membuang sampah daripada mengolahnya, kesadaran masyarakat masih minim. Sedangkan faktor penghambat dari pihak pemerintah lebih kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigma lama bahwa masyarakat merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Sedatigede dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan. Selain itu, koordinasi Pemerintah Desa dalam hal

pengolahan sampah masih belum maksimal membuat beberapa pihak masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengolah sampah di tempat pembuangan sampah desa.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pihak yang terlibat menyadari substansi kerjasama yang dilakukan tersebut. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Masyarakat menyadari arti penting pembangunan bagi mereka.
- b. Faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

2. Saran

- a. Diharapkan Pemerintah Desa Sedatigede dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan desa terus dipertahankan dan semakin dikembangkan. Apa yang telah dicapai Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Sedatigede terutama dalam pengolahan sampah sebaiknya dijadikan wacana dan tindak lanjut terutama bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan gagasan pengolahan sampah desa. Mengingat mayoritas desa di Kabupaten Sidoarjo menurut pengamatan penulis masih belum mempunyai visi yang baik dalam mengolah sampah.
 - b. Diharapkan agar Pemerintah Desa Sedatigede menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pengolahan sampah, diharapkan Pemerintah Desa Sedatigede lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih *intens* dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pengolahan sampah.
-

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. (2012). *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arnstein. (1996). *A Leader Of Citizen Partisipation Journal Of The Royal Town Planning Institute*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Effendi, Bachtiar. (2002). *Hal Utama dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar. (2000). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hardjosoemantri, K. (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johannes. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Laksana, Nuring Septyasa. (2013). *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Gremedia
- Rivai, Veithzal. (2004). *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, P. Sondang. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Theresia, Aprillia, dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
-

Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tjokroamidjojo. (1982). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
